



The
Samdhana
Institute

Jalan Kita Jalan Budaya

Our Path – the Cultural Path

Strategi Samdhana di Papua 2025-2030
Samdhana Strategy in Papua 2025-2030

Jalan Kita Jalan Budaya

Our Path – the Cultural Path

Strategi Samdhana di Papua 2025-2030

Samdhana Strategy in Papua 2025-2030

DAFTAR ISI

List of Contents



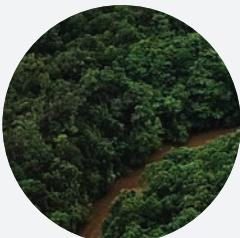
02

Pengantar
Foreword



42

Chapter IV
Tentang Manusia dan
Kebisaannya
*Humans and Their
Abilities*



52

Chapter V
Orientasi dan Pendekatan
Orientation and Approach



08

Chapter I
Menanam
the Planting



24

Chapter II
Jalan Budaya
Cultural Path



62

Chapter VII
Epilog
Panggilan Strategis
Strategic Call



58

Chapter VI
Maju...Majulah Suku-Suku
Move Forward, Tribes!



Photo by INFIS FOR SAMDHANA/Agus

Pengantar

Foreword

Photo by SAMDHANA/Anggit Saranta



Permulaan

Pada awalnya, Strategi Samdhana Papua ditulis pada tahun 2018¹. Tulisan itu memandu karya-karya Samdhana di Tanah Papua sejak saat itu, melalui semua program, proyek, dan aktivitasnya sejak tahun 2020, dan melihat 5 tahun kedepan. Sejalan dengan dokumen Rencana Strategis Samdhana, Strategi Samdhana di Papua tersebut memimpin karya-karya tersebut dalam mencapai tujuan kepastian hak dan

The Beginning

The first Samdhana strategy was written in 2018.. This document has since guided Samdhana's work in Papua through all its programs, projects, and activities since 2020 to the next five years. Aligned with Samdhana's Strategic Plan, the Papua Strategy has directed these efforts toward achieving secure rights and sustainable livelihoods, preserving ecological functions and biodiversity in Papua, and contributing to global efforts to address climate change.

pengembangan penghidupan, melestarikan fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati di Tanah Papua, serta berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Kemudian, di tahun 2023 hingga pertengahan 2024, Samdhana memulai proses untuk meninjau kembali dan

From 2023 to mid-2024, Samdhana began the process of reviewing and revising the 5 year strategy. This involved asking questions, engaging in discussions, and consulting with Samdhana members as well as many partners and communities in Papua. Key questions included: How has the strategy guided Samdhana's work in Papua? What progress, achievements, changes, and current contexts

“Strategi Samdhana di Papua tersebut memimpin karya-karya tersebut dalam mencapai tujuan kepastian hak dan pengembangan penghidupan”

“Samdhana’s Strategic Plan, the Papua Strategy has directed these efforts toward achieving secure rights and sustainable livelihoods”

merevisi Strategi 5 tahun tersebut. Samdhana bertanya, berdiskusi, dan berkonsultasi dengan semua orang di Samdhana serta dengan banyak mitra dan komunitas di Papua. Pertanyaannya adalah: Bagaimana Strategi tersebut telah memandu Samdhana dalam pekerjaannya di Tanah Papua? Apa kemajuan, pencapaian, perubahan, konteks saat ini terkait hak-hak Masyarakat Adat di Tanah Papua? Bagaimana pengakuan dan perlindungan eksistensi, identitas, tata kelola, hukum adat, budaya, spiritualitas, wilayah dan kedaulatan Masyarakat Adat telah berkembang? Bagaimana Masyarakat Adat di Papua telah mengembangkan penghidupan mereka, meningkatkan mata pencaharian, mengurus kebutuhan sehari-hari, membuat keputusan-keputusan ekonomi,

exist regarding the rights of Indigenous Peoples in Papua? How have the recognition and protection of the existence, identity, governance, customary law, culture, spirituality, territories, and sovereignty of Indigenous Peoples evolved? How have Indigenous Peoples in Papua developed their livelihoods, improved their incomes, addressed daily needs, made economic decisions, and managed their territories and resources? Lastly, what are the current political, social, economic, legal, and environmental conditions at both national and global levels, and what are the trends in Papua’s Indigenous Peoples’ movement?

The questions, answers, diverse information, perspectives, and ideas that have been discussed—along with our

Photo by SAMDHANA/Abyan



dan mengelola wilayah dan kekayaan mereka? Dan, akhirnya, bagaimana keadaan politik, sosial, ekonomi, hukum, lingkungan, di tingkat nasional dan global, dan tren gerakan Masyarakat Adat Papua?

Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban, berbagai informasi, perspektif, dan gagasan yang kita perbincangkan, dan semua yang kita yakini selama ini itulah yang kemudian dirangkum dan diuraikan, dan dimasukkan dalam tulisan ini, Strategi Samdhana di Papua 2025-2030.

principles—have been summarized, elaborated, and incorporated into this document: Samdhana Strategy for Papua 2025–2030.

¹ Dokumen lengkap Strategi Samdhana di Papua 2019-2024 ada di sini:
https://drive.google.com/file/d/1n-J5ntkvJjm3-cxSK1xLOK8DR_BY9s_d/view?usp=drivesdk

Panenan

Hingga saat ini, Samdhana bersama mitra mitra telah bekerja di 99 lokasi di 6 Wilayah Adat di Tanah Papua. Selain Samdhana, ada lebih banyak lagi organisasi lain yang telah bekerja di Tanah Papua. Bersama-sama, Samdhana dan berbagai organisasi tersebut telah menanam dan memanen. Panenannya berupa banyak komunitas adat yang kini telah mendapatkan pengakuan mereka, banyak kabupaten telah mengeluarkan peraturan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat, dan 6 hutan adat telah diakui oleh pemerintah pusat.

Selain panenan berupa pengakuan keberadaan Masyarakat Adat, ada juga panenan dalam bentuk lain, misalnya berbagai inisiatif pengembangan sumber penghidupan, kelompok-kelompok usaha komunitas yang memproduksi berbagai barang dan jasa, dan sedikit banyaknya telah mengemuka pula berbagai isu masyarakat adat, pelestarian hutan, dan pembangkitan budaya dan bahasa Papua.

Tentu saja tidak semua hasil panen itu, yang berbagai jenis dan jumlahnya, sama kualitasnya, sama kematangan dan nilai manfaatnya. Cukuplah dikatakan di sini bahwa ada hasil panen yang baik, ada yang kurang baik. Ada hasil panen yang bisa dinikmati bersama secara rukun, tapi ada saja hasil panen yang justru membuat orang dan komunitas malah jadi tidak rukun. Tapi gak papa juga, karena semua ini adalah dinamika bekerja di Tanah Papua.

The Harvest

To date, Samdhana has worked in 99 locations across the six customary territories of Papua. Alongside Samdhana, numerous other organizations have also been active in the region. Together, Samdhana and these organizations have sown seeds and reaped the harvest. This harvest includes many Indigenous communities that have now gained official recognition, several districts that have issued regulations for the recognition, protection, and empowerment of Indigenous Peoples, and six customary forests that have been formally recognized by the central government.

Beyond recognition for Indigenous Peoples, other forms of progress have also emerged. These include various livelihood development initiatives, community business groups producing a range of goods and services, and the growing prominence of issues surrounding Indigenous Peoples, forest conservation, and the revitalization of Papua's culture and languages.

Of course, not all harvests—diverse in type and quantity—are equal in quality, ripeness, or usefulness. It suffices to say that some outcomes have been excellent, while others have been less so. Some results have fostered harmony and mutual enjoyment, but there are also instances where the outcomes have led to discord among individuals and communities. Even so, this is all part of the dynamics of working in Papua.

These outcomes reflect the efforts of the past five years,

Jadi, itulah hasil dari 5 tahun terakhir, dari benih yang ditanam sejak lama sebelumnya, sejak awal tahun 2000-an, bahkan sebelumnya oleh berbagai individu dan organisasi.

Inilah panen yang berkelimpahan, bukan panenan Samdhana saja tapi panenan banyak sekali individu dan organisasi. Ini adalah kolaborasi dengan berbagai bentuk saat memanen, juga berkat kolaborasi luas saat menanam berpuluhan tahun sebelumnya, kolaborasi pihak-pihak berbagai ragam, di tempat-tempat yang berbeda,

stemming from seeds planted long ago—since the early 2000s, or even earlier—by various individuals and organizations.

This is an abundant harvest, not only for Samdhana but also for many other individuals and organizations. It is the product of collaboration, in many forms, during the harvesting process, as well as the result of extensive cooperation during the planting process decades ago. This collaboration involved diverse stakeholders, in various locations, at different times, and through methods that were

Photo by SAMDHANA/Anggit Saranya



pada waktu yang tidak sama, dengan cara-cara yang tidak semua serupa.

Pada tahun 2018 itu, kita berkata, “Targetnya adalah pecah telor tenurial. Mari kita buat terobosan atas semua rintangan dan kesulitan ini; terobosan yang selama ini serasa sulit dicapai meskipun telah berinvestasi dan menanam selama beberapa dekade; sehingga sebuah kesuksesan dapat terwujud di Tanah Papua.”

not always uniform.

In 2018 we declared, “Our goal is to break through tenure barriers. Let us create breakthroughs to overcome the challenges and obstacles that have long seemed insurmountable, despite decades of effort and investment. Let us achieve success in Papua.”

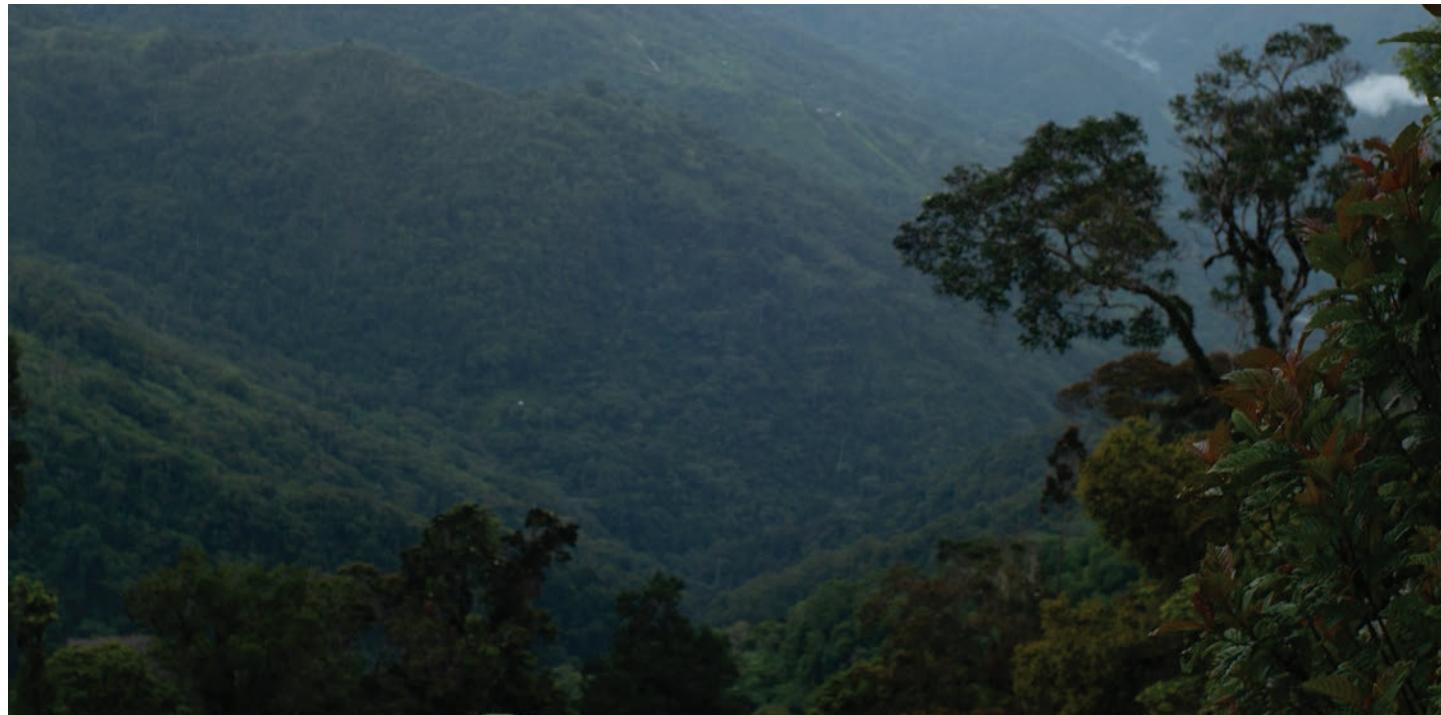


Photo by SAMDHANA/Andi Saragih

Chapter I: Menanam *the Planting*

Musim

Maka, setelah 5 tahun kemarin memanen, mari kita sebut 5 tahun mendatang, 2025 hingga 2030, sebagai musim menanam.

Dan, kita berkata, "Kita tidak akan seperti beberapa orang yang setelah sukses memanen, malah kemudian meninggalkan tanah itu dan tidak menanam lagi untuk siklus berikutnya."

The Season

So, after the past five years of harvesting, let us call the next five years, from 2025 to 2030, the planting season.

And let us say, "We will not be like those who, after a successful harvest, abandon the land and fail to plant again for the next cycle."

Photo by SAMDHANA/Anggit Saranta



Benih

Dari panen lima tahun lalu itu, kita telah mengumpulkan benih-benih yang baik, yang akan ditanam. Benih-benih buruk akan dipisahkan dan dibuang ke tanah agar membusuk dan menyuburkan tanah, agar benih-benih ekosospolbud baiklah yang tumbuh.



The Seed

From the harvest of the past five years, we have gathered good seeds to plant. Poor seeds will be separated and discarded, left to decompose and enrich the soil so that only the seeds of good socio-ecological and cultural values will grow.



Photo by SAMDHANA/Anggit Saranta

Tanah

Kita akan periksa dan siapkan tanah untuk penanaman. Benih-benih akan ditanam di tanah yang baik dan sehat, di mana komunitas adat bersedia dan siap untuk mengorganisir diri mereka sebagai masyarakat adat, pemilik bersama berbagai kekayaan; di mana sejarah, keberadaan, kelembagaan, hukum, dan wilayah mereka sudah atau sedang didokumentasikan, dipetakan, dan diakui; di mana ada kemauan dari kelas politik; di mana berbagai data dan informasi sosial-budaya-etnografis-ekonomi tersedia dan mudah diakses.

The Soil

We will examine and prepare the land for planting. The seeds will be sown in fertile and healthy soil—where Indigenous communities are willing and ready to organize themselves as collective stewards of their shared resources; where their history, identity, institutions, laws, and territories have been or are in the process of being documented, mapped, and recognized; where there is political will; and where socio-cultural, ethnographic, and economic data and information are readily available and accessible.

Photo by SAMDHANA/Kholik



Yang akan berat tentu saja adalah menanam di tanah yang tandus, yang tidak seperti yang telah disebutkan di atas. Di tanah-tanah tandus ini, kita akan mengandalkan kepada kesediaan berbagai pihak untuk bekerja bersama, berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan bukan organisasi, lintas kelas dalam arti seluasnya dan sesungguhnya.

The real challenge, of course, will be planting in barren soil—places that lack the conditions described above. In these barren lands, we will rely on the willingness of various stakeholders to work together, collaborate across organizations and non-organizations, and bridge diverse groups in the broadest and truest sense of the term.

Iklim

Tentu saja saat menanam, kita akan baik-baik membaca iklim. Kita akan memeriksa awan dan angin, kalender musim yang pernah ada, memperhatikan semua gemerisik dari arah politik sosial ekonomi budaya: seperti apa bisikan dan suaranya, apa langkah dan tindakan yang diambilnya. Yang sangat penting adalah mendengarkan. Sungguh-sungguh mendengarkan apa yang tua-tua sampaikan, termasuk tua-tua di Samdhana, tua-tua di organisasi mana-mana, tua-tua di kampung dan kota. Mendengarkan kemudian meneruskan, agar yang muda-muda pun bisa membaca iklim ekosospolbud, juga hukumenitekag (iklim hukum, investasi, pendidikan, ilmu dan teknologi, keagamaan).

The Weather

As we move forward with planting, we will carefully observe and analyze the climate. This involves studying the clouds and winds, referring to traditional seasonal calendars, and attentively noting every signal from the socio-political, economic, and cultural landscape: its whispers, its voices, and the actions it inspires. Above all, listening is paramount—truly listening to the wisdom shared by elders, whether from Samdhana, other organizations, or the communities in villages and cities alike. By listening and carrying their insights forward, we enable the younger generation to interpret the socio-ecological, political, and cultural climate, as well as the climate of law, investment, education, knowledge and technology, and spirituality.



Photo by SAMDHANA/Anggit Saranta

Penanam

Dari awal, kita akan mengatakan kepada mitra dan berbagai komunitas di Papua, "Inilah benih-benih milik kalian, dan inilah tanah kalian. Kalianlah yang membibitkan dan menanam."

Dan, kita juga akan mengatakan, "Jika kalian memimpin, kami akan mengikuti. Ketika kalian memulai, kami akan siap mendukung. Ketika kalian menghadapi masalah, kami akan menemani dalam mencari solusi."

The Planter

From the outset, we will tell our partners and various communities in Papua, "These are your seeds, and this is your land. You are the ones who will cultivate and plant them."

We will also say, "If you lead, we will follow. When you take the first step, we will be ready to support you. When you face challenges, we will stand by you to find solutions."

Photo by SAMDHANA/Naely Himami





Photo by SAMDHANA/Naelly Himami

Kebersamaan

Menanam adalah melawan, tapi juga membangun pertemanan. Semangat menanam adalah semangat perjuangan, persaudaraan, dan gotong royong semua orang.

Menanam (dan memanen) niscaya selalu menjadi sebuah kebersamaan di Wilayah Budaya dimana belum ada kemajuan dalam perjuangan hak dan pengembangan tata kelola ekonomi. Di Wilayah Budaya yang tanahnya masih gersang dan belum ada yang secara serius mengupayakan kepastian hak dan pengembangan tata kelola ekonomi itu.

The Unity

Planting is an act of resistance, but it is also about building friendship. The spirit of planting represents the spirit of struggle, brotherhood and sisterhood, and cooperation for all.

Planting (and harvesting) will undoubtedly always be an act of togetherness in Cultural Regions where there has been little progress in the struggle for rights and the development of economic governance. In these Cultural Regions, where the land remains barren and no serious efforts have been made to secure rights and develop economic governance.

Di Wilayah Budaya-Wilayah Budaya itu kita akan mengajak Masyarakat Adat mengorganisir diri, membangun kemauan politik, memetakan wilayah adat, dan menggali data etnografi. Ini adalah Wilayah Budaya Saireri (kabupaten Biak Numfor dan Yapen), La Pago (kabupaten Jayawijaya), Mee Pago (kabupaten Paniai dan Nabire), Anim Ha (kabupaten Merauke dan Mappi). Ke Wilayah Budaya ini kita akan pergi dan bekerja langsung, sambil sebisanya mengajak LSM atau mitra setempat kalau ada.

In these Cultural Regions, we will work with Indigenous communities to help them organize, build political will, map their customary territories, and gather ethnographic data. These regions include Saireri (Biak Numfor and Yapen districts), La Pago (Jayawijaya district), Mee Pago (Paniai and Nabire districts), and Anim Ha (Merauke and Mappi districts). In these areas, we will go directly to work, and where possible, collaborate with local NGOs or partners, if available.

Di Wilayah Budaya kita akan mengajak Masyarakat Adat mengorganisir diri, membangun kemauan politik, memetakan wilayah adat, dan menggali data etnografi.

In these Cultural Regions, we will work with Indigenous communities to help them organize, build political will, map their customary territories, and gather ethnographic data.

Namun, di Wilayah Budaya lain dimana panen telah berlimpah, dimana sudah banyak peraturan daerah yang mengakui masyarakat adat, bahkan barangkali sudah tumbuh banyak inisiatif pengembangan penghidupan, kita akan datang dan menanam bersama organisasi-organisasi dan komunitas adat untuk pengembangan ekonomi, melindungi dan mengelola wilayah dan kekayaan alam dan budaya mereka, mendirikan Badan

However, in other Cultural Regions where the harvest has been abundant, where local regulations already recognize Indigenous communities, and where many livelihood development initiatives have emerged, we will come and plant together with organizations and Indigenous communities to advance economic development, protect and manage their territories, and their natural and cultural wealth. We will also help establish Indigenous Peoples'

Usaha Milik Masyarakat Adat, BUMMA, dengan pilihan kelembagaan hukumnya: koperasi atau kewirausahaan sosial (PT).

Di Wilayah Budaya-Wilayah Budaya itu, kita akan bekerja dengan suku-suku yang wilayah adatnya telah atau dalam proses untuk didokumentasikan dan diakui, yang membangun keorganisasian di tingkat suku, dengan organisasi atau lembaga masyarakat adat yang aktif, atau mitra LSM yang mendukung dan mengorganisir suku tersebut. Suku-suku tersebut misalnya adalah suku Namblong, Kemtuk, Klisi di Jayapura; suku Manirem dan Isirawa di Sarmi; suku Mare, Miyah, Irerres, Moi Kelim, Knasaimos di Sorong Raya; suku Mbaham-Matta di Fak Fak. Jadi, kita akan bekerja di Wilayah Budaya Mamta (kabupaten Jayapura dan Sarmi), Domberai (kabupaten Maybrat, Tambraw, Sorong Raya), dan Bomberai (kabupaten Fak Fak dan Bintuni).

Business Enterprises (BUMMA), with institutional options such as cooperatives or social entrepreneurship as limited liability companies (PT).

In these Cultural Regions, we will work with tribes whose customary territories have been or are in the process of being documented and recognized. These tribes are building organizational structures at the tribal level, with active Indigenous community organizations or NGO partners supporting and organizing them. These include the Namblong, Kemtuk, and Klisi tribes in Jayapura; the Manirem and Isirawa tribes in Sarmi; the Mare, Miyah, Irerres, Moi Kelim, and Knasaimos tribes in Sorong; and the Mbaham-Matta tribe in Fak Fak. Thus, we will work in the Mamta Cultural Region (Jayapura and Sarmi districts), Domberai (Maybrat, Tambraw, and Sorong districts), and Bomberai (Fak Fak and Bintuni districts).



Photo by SAMDHANA/Andi Saragih

Photo by PANAH PAPUA/Sulfianto



Menumbuhataskan Kebijakan

Kita kini telah menemukan bahwa kebijakan dan regulasi paling sulit adalah yang di tingkat nasional. Ini karena belum adanya undang-undang yang mengakui dan melindungi Masyarakat Adat, dan banyaknya peraturan-perundangan yang terlalu sulit dan rumit bahkan menghambat kemajuan gerakan hak-hak Masyarakat Adat.

Kepada kelas politik di tingkat nasional, kita akan berkata, "Lihat dan mengertilah! Kamu tidak bisa

Fostering Policy Development

We have come to realize that the most difficult policies and regulations are at the national level. This is because there is still no law that recognizes and protects Indigenous Peoples, and the many regulations that are overly complex and even hinder the progress of the Indigenous rights movement.

To the political class at the national level, we would say, "Look and understand! You cannot cut off the head while holding the tail. The head will eventually turn and bite you."

melepaskan kepala tetapi memegang ekornya. Karena kepala itu pasti akan berbalik dan menggigitmu.”

Justru penuh takzim kita akan berkata, “Jalan kita ini, Jalan Budaya, sesungguhnya akan menyumbangkan solusi atas masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan pemerintah nasional dan daerah.” Bahkan, jalan budaya inilah jalan yang akan menyambungkan semua di negara kita: kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah (Propinsi-Kabupaten) dengan masyarakat adat Papua. Menguatkan negara, bukan melemahkannya. Karena bukankah demikian amanat konstitusi kita sesungguh-sungguhnya?

Dan, kita juga akan berkata, “Mari kita bekerja untuk

menerjemahkan undang-undang otonomi khusus menjadi peraturan turunan dan prosedur pelaksanaannya yang effisien, dan sungguh-sungguh melaksanakannya.”

Karena Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (2022-2041) secara tegas meletakan pengakuan wilayah adat sebagai faktor pemungkin (enabling condition) selain juga Pembangunan berbasis lingkungan (low emission development). Sehingga pendekatan hak adalah tegas tetap, tapi hal kuasa dan kelola adalah lentur dan berdaya guna.

Dan kita akan membawa dan menunjukkan contoh-contoh tentang perlu tegasnya soal pengakuan hak, dan perlunya lenturnya kuasa-kelola. Contoh-contohnya dari berbagai sektor yang perlu dihadapi dan dicarikan jalan keluar:

With utmost respect, we would say, “Our path, the Cultural Path, will truly provide solutions to the problems and interests of both the national and regional governments.” In fact, this cultural path is the one that will connect everyone in our country: cooperation with the central government, local governments (provinces – regencies), and the Indigenous communities of Papua. It will strengthen the state, not weaken it. After all, isn’t this the true mandate of our constitution?

We would also say, “Let us work together to translate the special autonomy law into regulations and implementation of efficient procedures, and truly carry them out.” Because the Papua’s Master Plan for Accelerated Development clearly defined the recognition of indigenous territory is the enabling factor in addition to the low emission-based development. Therefore, the approach through rights are firmly established, authority and governance are flexible and functional.

And we will present and demonstrate examples of the importance of firmly recognizing rights, as well as the need for flexibility in governance. Real-life examples from various sectors that need to be addressed and for which solutions must be found:

Tentang urusan pengakuan masyarakat dan wilayah adat yang terus diambahkan tidak jelas, tapi urusan perkebunan sawit dan food estate perintahnya sangat tegas;

Tentang kebijakan fiskal, katanya otonomi, nyatanya sebagian besar persetujuan penggunaan dan segala nomenklatur anggaran dana kampung dan dana otonomi khusus tetaplah aturan dan standar dari Jakarta;

Tentang pendidikan dan kebudayaan, bukannya patuh pada amanat otonomi khusus untuk memperkuat budaya dan bahasa asli di dalam kurikulum pendidikan, malahan umumnya sekolah-sekolah di Tanah Papua mengikuti kurikulum dari kementerian yang menekankan pada Bahasa Indonesia dan Sejarah Nasional;

Tentang arahan penerapan konservasi dan keberlanjutan, tapi pembiaran kebocoran kayu, tambang, ikan dan karang dari Papua.

Tentang rezim manajemen hutan dan perizinan usaha: PBPH untuk kawasan hutan negara dan skema Perhutanan Sosial, yang keduanya belum sesuai dan perlu terobosan alternatif agar sejalan dengan teks, konteks, dan semangat undang-undang otonomi khusus Papua, dan gerakan Masyarakat Adat senusantara.

Kerja besar ini tidak dapat dilakukan sendiri, hanya dengan kerjasama multipihak (pemerintah, masyarakat sipil, swasta) dan multitaran (global, regional, nasional, daerah) hal ini dapat mendapatkan inspirasi dan jawaban.

The issue of recognizing Indigenous communities and customary territories, remains ambiguous, while the directives for palm oil plantations and food estates are very clear;

Regarding fiscal policy, which claims autonomy, most approvals for village funds and special autonomy funds still follow rules and standards from Jakarta;

In education and culture, instead of adhering to the mandate of special autonomy to strengthen local cultures and languages in the curriculum, schools in Papua generally follow the curriculum from the ministry, focusing on the Indonesian language and National History;

On conservation and sustainability directives, yet there is a tolerance for illegal logging, mining, fishing, and coral damage in Papua;

Regarding forest management and business permits: PBPH for state forest areas and the Social Forestry scheme, both of which are not in line with the texts, contexts, and spirit of Papua's special autonomy law, nor with the Indigenous Peoples' movement across the archipelago.

This massive work cannot be done alone; only through multi-stakeholder collaboration (government, civil society, private sector) and multi-level engagement (global, regional, national, local) can it find inspiration and solutions.

Mengelola Pengetahuan

Baiklah supaya berbagai komunitas berbagi cerita, mengalir dari generasi ke generasi, dan baiklah apabila pada dasarnya komunikasi yang terutama dan terpenting, adalah komunikasi untuk dan bersama masyarakat adat dan komunitas lokal, berbagai kelompok dan organisasi di Tanah Papua sendiri.

Managing Knowledge

Let it be that various communities share their stories, passed down from generation to generation, and let it be that the primary and most important communication is communication for and with Indigenous Peoples, local communities, and various groups and organizations in Papua itself.



Photo by SAMDHANA/Sandika Ariansyah



Photo by SAMDHANA/Arggit Saranta

Mengenai hal ini, seorang intelektual Papua pernah mengatakan, "Dalam hal komunikasi di konteks Papua, simbolisme dan metafora adalah koentji."

Demikianlah agar informasi dan pengetahuan, praktek-praktek baik, jalan hidup adat menjadi inspirasi bagi dan memperkaya Papua dan gerakan sosial-budaya lingkungannya. Bagi kita sendiri, marilah mencerminkan bahwa kita bertanggung jawab dan melapor kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Tanah Papua.

Hendaklah demikian supaya kebijaksanaan, perjuangan serta kegembiraan Papua menjadi hadiah

On this matter, a Papua intellectual once said, "In the context of communication in Papua, symbolism and metaphor are the keys."

Thus, may information and knowledge, best practices, and the traditional way of life become an inspiration for and enrich Papua and its socio-cultural-environmental movement. For ourselves, let us reflect our accountability by reporting back to the Indigenous Peoples and Local Communities in Papua.

May it be so, so that the wisdom, struggles, and joys of Papua become the most valuable gift for Indonesia and

paling berharga bagi Indonesia dan dunia. Agar kita bisa mengatakan bahwa Papua menyumbangkan sesuatu yang paling berharga ini, lebih dari hutan, keanekaragaman hayati, tambang dan mineral, penyerapan karbon, dan semua produk dan layanan yang berasal dari kekayaan dan kebaikan Papua.

the world. Let us ensure we can proudly say that Papua offers this priceless contribution—far beyond its forests, biodiversity, minerals, carbon sequestration, and all the products and services derived from Papua's wealth and generosity.



Photo by SAMDHANA/Abyan

Mengelola Risiko

Baiklah supaya saat memulai dan di sepanjang perjalanan di Tanah Papua ini, kita selalu siap dengan memahami dan menerima kenyataan bahwa semua hal pasti ada risikonya, sedia dengan strategi pencegahannya, mengendalikannya, kalau perlu pindah-ubahkan kapasitas, jadwal, anggaran supaya beban dari risiko tertentu lebih bisa ditangani, dan tentu saja terus menerus memantau potensi-potensi risiko ekosospolbudhukling bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, juga berbagai organisasi, pihak-pihak, dan kita sendiri.

Sambil selalu waspada diri dan berbenah supaya segala sistem dan prosedur internal kita memadai, cukup lentur dan adaptif, akomodatif, pelayanan bintang lima, agar sesuai dengan Strategi ini dan mampu mengelola berbagai risiko dalam menjalani Strategi ini.

Apapun itu, prinsip paling utama tetap harus berlaku: Masyarakat Adat sendiri yang akan memahami dan memutuskan apa yang akan dilakukan beserta berbagai risiko dan mitigasi risikonya.

Managing Risks

Let us begin and continue our journey in Papua with the readiness to understand and accept that every endeavor carries risks. We must be prepared with strategies to prevent and manage these risks, and, if necessary, adjust capacities, timelines, and budgets to better handle the burden of specific challenges. At the same time, we must consistently monitor potential socio-cultural-political-environmental-legal risks that may affect Indigenous Peoples, Local Communities, other stakeholders, and ourselves.

We must remain vigilant and continuously improve, ensuring that our internal systems and procedures are adequate, flexible, adaptive, accommodating, and deliver top-tier service. These should align with this Strategy and enable us to effectively manage any risks encountered along the way.

Above all, one principle must always take precedence: Indigenous Peoples must be the ones who understand and decide what actions to take, along with the risks and mitigation strategies involved.



Photo by INFIS FOR SAMDHANA/Agus

Chapter II: Jalan Budaya (Jalan Hidup Masyarakat Adat)

The Cultural Path (The Indigenous Peoples Way of Life)

Kita telah mengamati betapa begitu banyak LSM dan non-LSM, begitu banyak proyek dan kegiatan tentang dan untuk Masyarakat Adat, menjadi hampa adanya. Sebuah kekosongan dari dasar spiritualitas, kesakralan, jalan hidup masyarakat adat. Bahkan sentuhan-sentuhan yang paling gampang, yang paling mudah terlihat — aksen kah, suatu aksesori kah, sentuhan etnik kah apa.

Tapi, kita kini penuh semangat untuk merangkulkan diri dan moga-moga berkontribusi pada pembangkitan Masyarakat Adat dalam keutuhannya, merayakan tanah dan wilayah tapi juga ritual dan upacara adatnya, kekuatan politik tapi juga spiritualnya, hutan dan lautan tapi juga sistem-pengetahuan-prakteknya, seni nyanyi tarinya.

Filosofi Noken

Menoken adalah praksis dari noken. Noken adalah sepenuhnya Papua. Ini adalah tas anyaman sederhana dan seperangkat tatanan yang hidup, bagian sentral dari

We have observed how so many NGOs and non-NGOs, along with numerous projects and activities focused on and for Indigenous Peoples, often feel empty and devoid of meaning. They lack a foundation of spirituality, sacredness, and the way of life of Indigenous Peoples. Even the simplest and most visible touches—an accent, an accessory, or an ethnic element—are often absent.

Yet, we are now filled with enthusiasm to embrace and, hopefully, contribute to the revival of Indigenous Peoples in their wholeness. This includes celebrating their lands and territories alongside their rituals and ceremonies, their political strength alongside their spirituality, their forests and oceans alongside their systems of knowledge and practices, and their arts, songs, and dances.

Noken Philosophy

Menoken embodies the praxis of the noken. The noken is quintessentially Papua—a simple woven bag and a living system of order, central to the identity and daily life of every

identitas dan kehidupan sehari-hari setiap orang Papua. Selain dan lebih dari sekedar fungsi praktisnya, noken adalah tentang kelenturan, keterbukaan, transparansi, keberdayagunaan, inklusivitas, kesetaraan, dan keterhubungan — serupa rahim yang adalah kasih yang menumbuhkan dan merawat kehidupan.

Demikianlah sehingga Masyarakat Adat Papua duduk melingkari tungku api. Demikianlah sehingga setiap orang Papua punya noken. Sesungguhnya, setiap orang memiliki sesuatu untuk memberi dan menerima. Siapa saja, lintas generasi lintas kelompok lintas SARA.

Oleh karena itu, kita berkata, “Demikianlah seharusnya cara kita melakukan hal-hal dengan dan untuk Masyarakat Adat di Papua.”

Papuan. Beyond its practical functions, the noken represents flexibility, openness, transparency, utility, inclusivity, equality, and interconnectedness—much like a womb that nurtures and sustains life with love and care.

This is why Indigenous Papuans gather around the hearth. This is why every Papuan has a noken. At its core, everyone has something to give and receive—across generations, groups, and differences in ethnicity, religion, or affiliation.

Thus, we say: “This is how we should approach everything we do with and for Indigenous Peoples in Papua.”



Photo by SAMDHANA/Andi Saragih

Photo by SAMDHANA/Abyan



Bahasa, Cara, Kearifan

Budaya selalu dilandasi dan diwakili bahasa. Inilah panduan kita, makanya bekerja bersama sekolah-sekolah adat yang selalu menempatkan revitalisasi bahasa asli sebagai program utamanya. Sesungguhnya berbahasa asli, cara pandang dan cara hidup, kearifan adat adalah lebih, minimal sama, berguna dan berharganya dibanding bahasa, cara pandang, cara hidup, kearifan Indonesia atau Inggris atau mana saja.

The Language, the Way, the Wisdom

Culture is always rooted in and represented by language. This is our guiding principle, which is why we prioritize working with indigenous schools that place the revitalization of native languages at the core of their programs. Truly, speaking one's native language, embracing one's worldview and way of life, and upholding indigenous wisdom are equally, if not more, valuable and meaningful than the languages, perspectives, lifestyles, or wisdom of Indonesia, English, or any other culture.

Ritual dan Upacara

Dan kita berkata, "Marilah kita berusaha sebisanya menyertakan dan melakukan ritual dan upacara dalam berbagai acara dan kegiatan kita, sesuai dengan orang dan tempatnya, saat berkegiatan dengan Masyarakat Adat."

The Ritual and Ceremony

And we say, "Let us do our best to incorporate and perform rituals and ceremonies in our various events and activities, according to the people and the place, when engaging with Indigenous Peoples."



Photo by SAMDHANA/Anggit Saranta

Wilayah Budaya

Dari dulu umum sudah tahu bahwa ada 7 Wilayah Budaya di Tanah Papua: Mamta, Domberai, Bomberai, Saireri, La Pago, Me Pago, dan Anim Ha. Demikianlah Tanah Papua yang besar sekali itu diorganisir berdasarkan budayanya.

Di dalam setiap Wilayah Budaya tersebutlah ada suku-suku, seturut hubungan kekerabatan, bahasa yang berkembang, aturan-kelembagaan-sistem kepemimpinan, kosmologi dan mitologi. Dengan kata lain: seturut budayanya. Batas wilayah antar suku pada umumnya mengikuti batas alam: sungai, pulau dan pantai, bukit, gunung, lembah, dan seterusnya.

The Cultural Regions

It has long been known that there are 7 Cultural Regions in Papua: Mamta, Domberai, Bomberai, Saireri, La Pago, Mee Pago, and Anim Ha. This is how the vast land of Papua is organized, based on its cultures.

Within each of these Cultural Regions, there are tribes, which are defined by kinship, the languages spoken, the rules, institutions, systems of leadership, cosmology, and mythology. In other words, they are shaped by their culture. The boundaries between tribes generally follow natural landmarks: rivers, islands, coastlines, hills, mountains, valleys, and so on.



Photo by SAMDHANA/Andi Saragih

Demikianlah maka di Tanah Papua ada 7 Wilayah Budaya dan 300 lebih suku.

Di dalam suku-suku tersebutlah ada marga-marga, atau klan, atau fam. Di marga itulah kepemilikan hak ulayat, kepemilikan tanah, kepemilikan hutan, kepemilikan sumber-sumber penghidupan.

Thus, in Papua, there are 7 Cultural Regions and over 300 tribes.

Within these tribes, there are clans, or families, where the rights to customary land, forests, and sources of livelihood are owned.

“Batas wilayah antar suku pada umumnya mengikuti batas alam: sungai, pulau dan pantai, bukit, gunung, lembah, dan seterusnya”

“The boundaries between tribes generally follow natural landmarks: rivers, islands, coastlines, hills, mountains, valleys, and so on”

Dan karena kita kini mengutamakan kebangkitan kedaulatan daripada kepastian kepemilikan, maka kita mengatakan, “Mari bekerja seturut jalan budaya itu. Supaya berdaulatlah Masyarakat Adat atas budaya, hukum, kelembagaan, dan wilayahnya.

Sekaligus pula, inilah bekerja pada skala terkelola, 300an suku dibanding puluhan ribu marga atau kampung, menuju Tanah Papua yang bermartabat, mandiri, berdaulat.

As we now prioritize the resurgence of sovereignty over the certainty of ownership, we say, “Let us work in accordance with this cultural path. Let Indigenous Peoples assert their sovereignty over their culture, law, institutions, and lands.

At the same time, this is working at a manageable scale—300 tribes as compared to tens of thousands of clans or villages—toward a dignified, independent, and sovereign Papua.”

Wilayah Adat

Pertama-tama, kita menegaskan bahwa seluruh proyek dan aktivitas memetakan, meregistrasikan, dan memformalkan Hak Ulayat Marga, Tanah Milik Adat, dan Hutan Adat adalah baik adanya. Bagus! Apresiasi! Mainkan!

Berikutnya, pada saat ini, sekitar dua tahun setelah Hutan Adat-Hutan Adat ditetapkan oleh KLHK di Tanah Papua, kita mengalami sebuah pembelajaran. Kita menemukan bahwa skema Hutan Adat ternyata tidak cukup dan tidak memadai dalam kerangka kedaulatan Masyarakat Adat atas seluruh wilayah adatnya. Selain itu proses penetapan

Hutan Adat adalah rumit dan kembali membebani Masyarakat Adat untuk membuktikan diri dan keberadaan hutan adatnya. Pada akhirnya, selain sangat sedikit secara luasan, kecepatan penetapan Hutan Adat menjadi sangat lambat, jauh terlambat dari kecepatan masuknya berbagai investasi yang ekstraktif dan destruktif.



Photo by SAMDHANA/Anggit Saranta

the Customary Territories

First and foremost, we affirm that all projects and activities related to mapping, registering, and formalizing the rights to customary land, Indigenous territories, and customary forests are indeed positive. Excellent! Our appreciation! Let's move forward with them!

Next, at this point, about two years after the recognition of customary forests by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in Papua, we have gained some insights. We have found that the customary forest scheme is not sufficient and inadequate within the framework of Indigenous Peoples' sovereignty over their entire customary territory.

Additionally, the process of establishing customary forests is complex and burdensome for Indigenous Peoples, requiring them to prove their identity and the existence of their customary forests. As a result, not only is the area of customary forests very limited, but the pace of their establishment has been very slow, much slower than the rate at which extractive and destructive investments are entering.



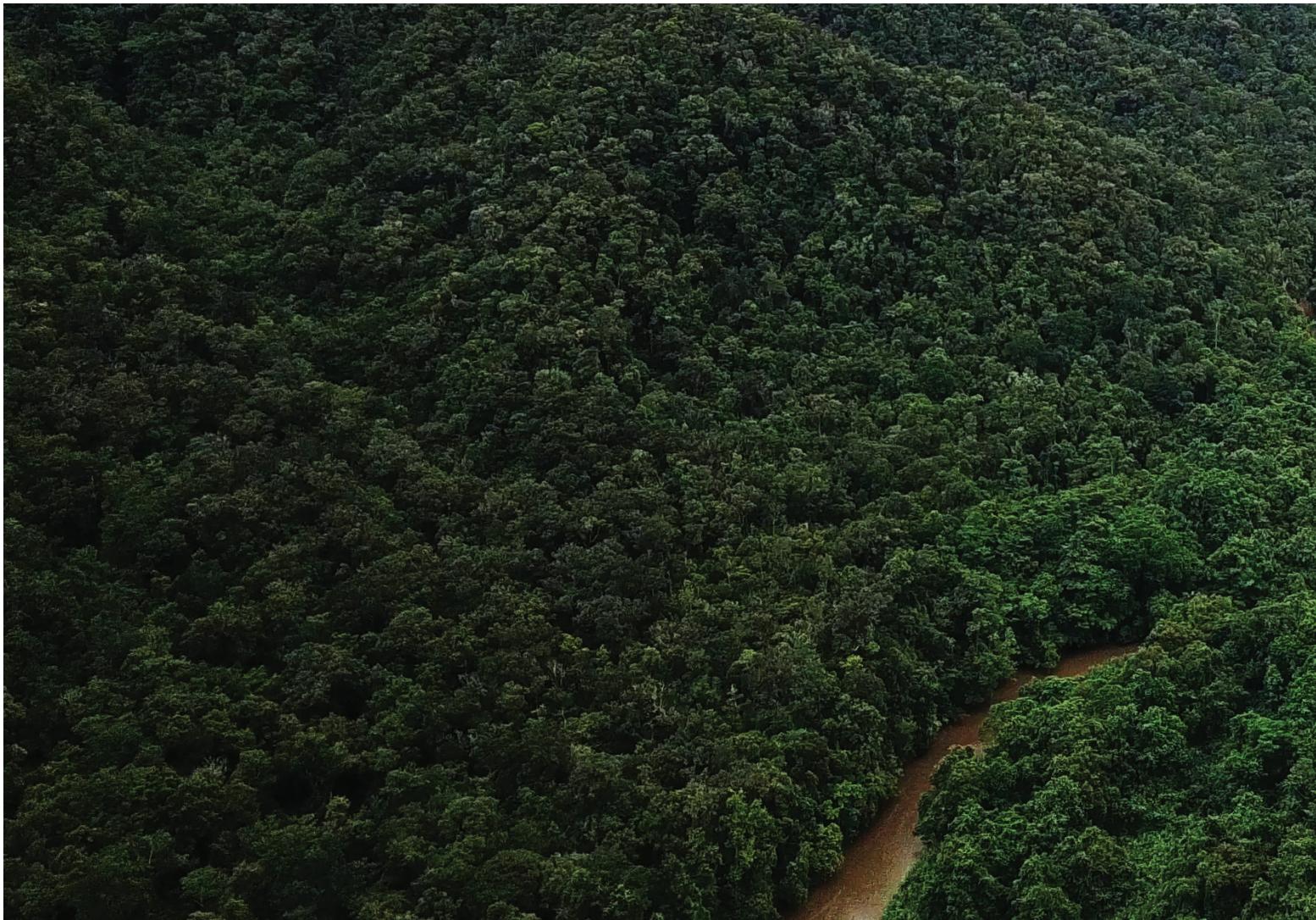
Photo by SAMDHANA/Anggit Saranta

Pada dasarnya hal Hutan Adat adalah hal meregistrasikan status di Lembaran Negara. Bukankah MK35 telah memutuskan bahwa hutan-hutan yang ada di dalam Wilayah Adat adalah bukan Hutan Negara? Dan dengan demikian: apa namanya, dimana lokasinya, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sana, oleh siapa, kapan dan caranya, dan seterusnya

In essence, the issue of customary forests is about registering their status in the State Gazette. Isn't it true that the Constitutional Court's Decision 35 (MK35) has ruled that forests within Indigenous territories are not State forests? Therefore, questions regarding the name, location, what can and cannot be done there, by whom, when, and how, should rightfully fall under the rules and laws, the authority, and sovereignty of the Indigenous Peoples themselves. This is

mestinya sudah kembali kepada aturan dan hukum, kekuasaan dan kedaulatan Masyarakat Adat itu sendiri, yaitu ketika keberadaan Masyarakat Adat itu bersama Wilayah Adatnya diakui dan ditetapkan secara resmi melalui Perda, Pergub, Perbup, SK Gubernur atau SK Bupati.

the case when the existence of Indigenous Peoples and their territories is officially recognized and established through regional regulations (Perda), provincial regulations (Pergub), regency regulations (Perbup), governor's decrees (SK Gubernur), or regent's decrees (SK Bupati).



Semua ini adalah dalam semangat dan pandangan konstruktif, apresiatif terhadap seluruh kebijakan dan upaya yang sedang berjalan terkait Hutan Adat. Semangat dan pandangan konstruktif ini justru adalah supaya Hutan Adat, yang sangat lambat, sedikit dan rumit, tidak menjadi seperti sekedar gula-gula: kecil,

All of this is expressed in a constructive and appreciative spirit toward the ongoing policies and efforts related to customary forests. This constructive spirit is precisely to ensure that the slow, small, and complicated process of customary forest recognition does not end up being just a small, sweet, and short-lived concession.



Photo by SAMDHANA/Sandika Ariansyah

manis dan cepat habis.

Sebab, manusia tidak bisa hidup hanya dari gula-gula tapi dari segala protein, karbohidrat, vitamin, kalsium, dan lain sebagainya, dalam jumlah yang memadai pula. Gula-gula hanya cocok saat terbang dengan pesawat udara, supaya mulut para penumpang tidak asam, supaya berkuranglah nafsu membuat keributan.

Oleh karenanya, agar asupan memadai dan lengkap nutrisi, maka kita menyatakan bahwa tentang dan menuju Wilayah Adat lah kita bekerja: memetakan, membangun kesepakatan-kesepakatan, menyiapkan data sosial, menggali etnografi, dan mendorong pengakuan dan penetapannya di Kabupaten dan atau Provinsi.

After all, humans cannot live solely on candy, but need a full range of nutrients, such as proteins, carbohydrates, vitamins, calcium, and so on, in adequate amounts. Candies are only suitable for air travel to prevent the sourness in passengers' mouths and to reduce the urge to create disturbances.

Therefore, in order to ensure sufficient and complete nutritional intake, we declare that our focus should be on Indigenous territories: mapping, building agreements, preparing social data, conducting ethnographic studies, and advocating for their official recognition and establishment at the regency or provincial level.



Photo by SAMPDHANA/Andi Saragih

Chapter III:

Tema

Theme

Hak-Hak Masyarakat Adat

Kita akan terus bekerja dengan dan mendukung Masyarakat Adat di Papua menuju pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. Justru, kita akan melampaui hal kepemilikan tanah dan kepemilikan kekayaan intelektual, dan bekerja pada hal esensial tentang tenurial, ekonomi, pendidikan, dan budaya.

Indigenous Peoples' Rights

We will continue to work with and support Indigenous Peoples in Papua towards the recognition and protection of their rights. In fact, we will go beyond issues of land ownership and intellectual property, and focus on essential matters such as tenure, economy, education, and culture.



Photo courtesy Yunus Yumte

Kita berkata, "Misalkan seseorang atau sekelompok orang telah memiliki sertifikat kepemilikan atas sebidang tanah, tetapi sesungguhnya yang lebih penting adalah siapa yang berkuasa memutuskan apa yang akan dilakukan di atas tanah tersebut. Artinya, meskipun siapa yang memiliki tanah itu tapi siapakah yang sesungguhnya berdaulat atasnya? Hukum, aturan, sistem siapakah yang berlaku di atas tanah itu?"

Hal ini karena kita selalu diingatkan bahwa di masyarakat adat di seluruh dunia ada prinsip bahwa tanah tidak bisa dimiliki oleh orang yang masih hidup di dunia, yang hanya bisa menjaga dan mengelola, karena hanya orang yang sudah tidak hidup di dunia, para leluhur, yang dapat memiliki tanah.

We say, "For example, if an individual or a group of people have a certificate of ownership for a piece of land, what is truly more important is who has the authority to decide what will be done on that land. In other words, even if someone owns the land, who truly has sovereignty over it? Which laws, rules, and systems apply to that land?"

This is because we are constantly reminded that in Indigenous societies worldwide, there is a principle that land cannot be owned by those who are still alive in this world; it can only be managed and protected. The land is owned by those who have passed away, our ancestors.



Photo by SAMDHANA/Anggit Saranta



Photo by SAMDHANA/Anggit Saranta

Ekonomi Adat

Tentang hal ekonomi ini, banyak orang Papua telah mengatakan dan mengungkapkan secara jelas. Mereka berkata, "Orang-orang pada skeptis kah apa, sampe ada dampak positif yang nyata dan konkret bagi kehidupan nyata orang Papua. Kertas sepanggal itu, SK pengakuan masyarakat adat atau penetapan hutan adat, tidak ada artinya bagi orang Papua."

Oleh karena itu, mari bangun Ekonomi Adat. Telah banyak dituliskan bahwa ada beberapa karakter atau definisi

Customary Economy

Regarding the economy, many Papuans have expressed their thoughts clearly. They say, "People are skeptical, even until there's a real and tangible positive impact on the lives of Papuans. That piece of paper, the decree on the recognition of Indigenous peoples or the establishment of customary forests, means nothing to the people of Papua."

Therefore, let us build an Indigenous Economy. It has been widely written that there are various characteristics or definitions of Indigenous Economy. All of these are good:

dari Ekonomi Adat. Semua itu baik adanya: progresif dan liberal regeneratif, restoratif, hijau, berkelanjutan, dan lain sebagainya. Tetapi kita mengatakan, "Mari bangun badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat adat itu sendiri, yang akan menjadi sistem dan kelembagaan ekonomi mereka sendiri. Sehingga mereka dapat membuat keputusan, memiliki kendali atas sumber penghidupan mereka sendiri, melindungi dan mengelola wilayah mereka sendiri, merayakan kekayaan alam dan budaya mereka sendiri."

Keanekaragaman Hayati

Beberapa orang mungkin akan berkata, "Oh... kalian ini kuno kah apa. Biarkan saja urusan keanekaragaman hayati diurus oleh lembaga-lembaga konservasi konservatif!"

Tetapi, kita mengatakan, "Delapan puluh persen dari keanekaragaman hayati yang tersisa di bumi ini berada di wilayah adat, dijaga dan dikelola oleh Masyarakat Adat."

Kita juga mengatakan, "Keselamatan Masyarakat Adat juga berarti keselamatan keanekaragaman hayati, keselamatan alam semesta. Keselamatan dan kesejahteraan semua, yang terlihat dan yang tak terlihat. Inilah keterhubungan."

progressive, liberal, regenerative, restorative, green, sustainable, and so on. But we say, "Let us build businesses owned by Indigenous peoples themselves, which will become their own economic system and institutions. This way, they can make decisions, have control over their livelihoods, protect and manage their territories, and celebrate their own natural and cultural wealth."

Biodiversity

Some may say, "Oh... are you all outdated? Let the issue of biodiversity be managed by conservative conservation organizations!"

But we say, "Eighty percent of the remaining biodiversity on this earth is found in Indigenous territories, protected and managed by Indigenous Peoples."

We also say, "The safety of Indigenous Peoples is also the safety of biodiversity, the safety of the universe. The safety and well-being of all, both visible and invisible. This is interconnectedness."

Perubahan Iklim

Sudah tertulis dan dinyatakan bahwa segala upaya dan proyek penanganan perubahan iklim, apakah itu mitigasi, adaptasi, ataupun yang baru-baru ini: loss and damage, harus berdasarkan konsultasi dan padiatapa. Lebih jauh lagi, bahwa Masyarakat Adat harus menjadi penerima manfaat. Tetapi kita melangkah lebih jauh dari itu. Kita menentang paradigma umum bahwa Masyarakat Adat adalah partisipan, consultee, atau penerima manfaat; dimana pemberi manfaatnya adalah pemerintah, LSM, dan korporasi swasta.

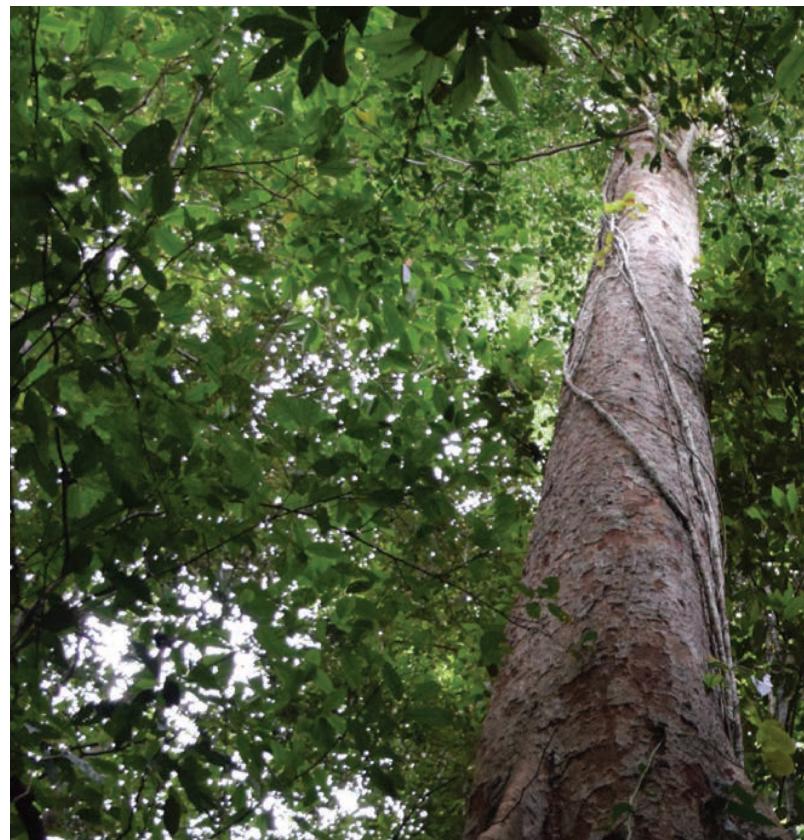
Kita berkata, "Masyarakat Adat seharusnya menjadi pemilik dan pengelola dari segala upaya atau proyek mitigasi atau adaptasi perubahan iklim itu. Sebagaimana mereka lah pemilik dan pengelola hutan dan laut dan wilayah, demikianlah juga terhadap segala upaya dan proyek di atas hutan dan laut dan wilayah itu. Bukankah selama ini pengetahuan, sistem, dan praktik mereka lah yang telah menjaga keseimbangan alam dan iklim."

Kita akan bekerja sama dengan para pihak, termasuk didalamnya organisasi masyarakat sipil, swasta , pemerintah dan lain-lain untuk memberikan penyadaran. Termasuk diantaranya menjadi lembaga perantara untuk pendanaan proyek-proyek lingkungan hidup yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan kerjasama dengan pemerintah daerah.

Dan kita menjadi rendah hati, sekaligus dikuatkan.

Climate Change

It has been written and stated that all efforts and projects addressing climate change, whether mitigation, adaptation, or more recently, loss and damage, must be based on consultation and padiatapa. Furthermore, Indigenous Peoples must be the beneficiaries. However, we go further than that. We oppose the common paradigm that Indigenous Peoples are mere participants, consultees, or beneficiaries,



Supaya dengan demikian genaplah nubuat yang diceritakan dari generasi ke generasi di Suku Namblong. Ini adalah cerita dari orang tua dan nenek moyang kepada anak-anak Namblong hari ini, "Suatu hari nanti orang dari segala penjuru dunia akan datang kepada kalian. Bapa Ibu kaka-kaka dong akan bekerja UNTUK kalian. Karena kalian akan memiliki perusahaan yang menghasilkan udara untuk nafas dunia."



Photo by SAMDHANA/Anggit Saranta

where the providers of benefits are governments, NGOs, and private corporations.

We say, "Indigenous Peoples should be the owners and managers of all climate change mitigation or adaptation efforts or projects. Just as they are the owners and managers of forests, seas, and lands, so too should they be in charge of all efforts and projects on those forests, seas, and lands. After all, it is their knowledge, systems, and practices that have maintained the balance of nature and climate."

We aim to work in partnership with various stakeholders, including NGOs, the private sector, government entities, etc. to foster greater awareness. This also involves serving as a facilitating body for environmental projects initiated by the Indonesia Environmental Fund Agency in cooperation with the local government.

And we remain humble yet strengthened. Thus, the prophecy passed down from generation to generation in the Namblong Tribe is fulfilled. This is the story told by the elders and ancestors to the children of Namblong today: "One day, people from all corners of the world will come to you. Your fathers, mothers, brothers, and sisters will work FOR you. Because you will own the company that produces the air for the world's breath."

Chapter IV:

Tentang Manusia dan Kebisaannya

Humans and Their Abilities

Manusia Di Dalamnya

Ada organisasi masyarakat adat, seperti Dewan Adat (DAS-DAD-DAP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Kankain Kankara Byak, PW-PD-komunitas-komunitas anggota AMAN, Organisasi Perempuan Adat (ORPA), BUMMA, sanggar-sanggar seni-budaya, dan organisasi masyarakat adat lainnya.

Ada komunitas-komunitas, seperti Komunitas Pemuda, Komunitas Tuli, Komunitas Vespa, Komunitas Basket, Komunitas Peduli, dan banyak lagi lainnya.

Ada juga organisasi non-masyarakat adat, non-komunitas, seperti LSM, aliansi/koalisi LSM, forum multipihak, lembaga-lembaga Pemerintah, Perusahaan, sekolah dan perguruan tinggi negeri dan swasta, dan organisasi non-masyarakat adat lainnya.

Di semua organisasi itu, Manusia lah yang ada di dalamnya. Manusia yang setiapnya adalah unik dan

Humans Within it

There are indigenous peoples' organizations, such as the Indigenous Council (DAS-DAD-DAP), Indigenous Peoples Institutions (LMA), Kankain Kankara Byak, PW-PD community members of AMAN, Indigenous Women's Organizations (ORPA), BUMMA, art and cultural studios, and other indigenous organizations.

There are also communities, such as Youth Communities, Deaf Communities, Vespa Communities, Basketball Communities, and many more.

Additionally, there are non-indigenous, non-community organizations, such as NGOs, NGO alliances/coalitions, multi-stakeholder forums, government institutions, companies, public and private schools and universities, and other non-indigenous organizations.

In all of these organizations, it is Humans who are at the core. Humans are unique, each with different abilities, traits,



Photo by SAMDHANA/Sandika Ariansyah

memiliki kemampuan, sifat, minat, dan kapasitas yang berbeda.

Pulang Kampung

Pada umumnya, kita telah melihat bahwa dalam hal mengelola proyek LSM/Pemerintah/Perusahaan, manusia yang bekerja di organisasi-organisasi non-masyarakat adat memiliki kapasitas yang lebih sesuai.

Maka, kita bertanya, "Mengapa manusia Papua yang memiliki kemampuan teknis, manajerial, keuangan, bisnis, fasih berbahasa Inggris, dan sebagainya, orang muda Papua yang telah menjadi profesional, belajar di universitas, bahkan di luar negeri, yang mampu memimpin dan mengelola proyek; kenapa mereka tidak bekerja dan menjadi bagian dari komunitas dan

interests, and capacities.

Returning to One's Hometown

In general, we have observed that when it comes to managing projects for NGOs/government/corporations, the people working in non-indigenous organizations tend to have more appropriate capacities.

Thus, we ask, "Why is it that Papua people who possess technical, managerial, financial, business skills, are fluent in English, and so on—young Papua who have become professionals, studied at universities, even abroad, and are capable of leading and managing projects—why don't they work and become part of their own indigenous communities, organizations, and institutions but instead go to work for NGOs/government/corporations?"

organisasi dan lembaga masyarakat adat mereka sendiri tetapi malah pergi dan bekerja untuk LSM/Pemerintah/Perusahaan?"

Kemudian, kita mengatakan, "Itulah sebabnya, pada umumnya, organisasi/kelembagaan masyarakat adat tidak memiliki kapasitas untuk memimpin dan mengelola proyek-proyek jenis tersebut; sementara LSM/Pemerintah/Perusahaan memiliki kapasitas untuk memimpin dan mengelola proyek-proyek jenis tersebut."

Dan, kita mengatakan, "Tentu saja, organisasi/kelembagaan masyarakat adat itu tidak memiliki kemampuan untuk menarik, merekrut, dan membayar gaji anak-anak adat mereka yang sudah terampil atau orang muda Papua yang telah belajar di universitas, diaspora secara fisik dan mental, bahkan di luar negeri; sedangkan LSM/Pemerintah/Perusahaan memiliki kemampuan untuk menarik, merekrut, dan membayar mereka."

We then say, "That is why, in general, indigenous organizations/institutions do not have the capacity to lead and manage such types of projects, while NGOs/government/corporations do have the capacity to lead and manage these kinds of projects."

And we say, "Of course, these Indigenous organizations/institutions lack the capacity to attract, recruit, and pay the salaries of their skilled Indigenous children or young Papuans who have studied at universities, are physically and mentally in the diaspora, even abroad; whereas NGOs/government/corporations have the capacity to attract, recruit, and pay them."



Photo by SAMDHANA/Anggit Saranta



Organisasinya, Kelembagaannya

Oleh karenanya, marilah kita kini memampukan organisasi/kelembagaan masyarakat adat tersebut untuk menarik, merekrut, dan membayar gaji orang muda Papua yang cerdas dan terampil itu. Marilah kita kini memampukan dengan sistem, perencanaan, dan dana agar orang muda Papua yang memiliki ketrampilan tertentu tersebut, telah belajar di universitas, bahkan di luar negeri, kini bisa pulang kampung (secara fisik, pikiran, dan atau modal), menjadi bagian, dan bekerja untuk organisasi dan kelembagaan mereka sendiri.

Sekali lagi, kita telah melihat bahwa yang perlu penanganan adalah kemampuan organisasi dan institusi. Sedangkan kemampuan manusia dan orang muda, toh setiap orang memiliki nokennya masing-masing, kapasitas unik dan khusus masing-masing.

Organization, Institutionality

Therefore, let us now empower these indigenous organizations/institutions to attract, recruit, and pay the salaries of those intelligent and skilled young Papuans. Let us empower them with systems, planning, and funding, so that these young Papuans, who have specific skills and have studied at universities, even abroad, can now return home (physically, mentally, and/or with capital) to be part of and work for their own organizations and institutions.

Once again, we have observed that what needs attention is the capacity of the organizations and institutions. As for the capacity of individuals and young people, each person has their own "noken," their unique and specific capacity.

Photo by SAMDHANA/Sandika Ariansyah



Cerita Anak Adat yang Pemburu

Suatu hari, seorang Mama dari suku Mare memulai proyek. Proyeknya adalah membangun pondok di dalam hutan. Dia memiliki dua anak laki-laki. Anak yang lebih tua adalah seorang pemburu dan pencari di hutan. Dia menyukai dan menghabiskan semua waktunya di hutan. Dia tidak pernah belajar di sekolah negeri atau swasta, tetapi dia belajar di sekolah alam dan adat. Anak yang lebih muda adalah seorang akuntan. Dia dikirim untuk sekolah, dari SD sampai universitas, di Jayapura.

Nah, tentu saja, Mama Mare itu memilih anaknya yang lebih tua untuk membangun pondok di dalam hutan itu. Pondok untuk dia dan keluarga mencari makanan dan obat-obatan, ketentraman dan kegembiraan, pondok sebagai penanda. Jadi, di sini kita melihat bahwa Mama Mare tersebut berkemampuan untuk menarik, merekrut, mengkompensasi seseorang dengan ketrampilan, kapasitas, profesionalitas untuk melakukan proyek tersebut.

The Indigenous Child Who Was a Hunter

One day, a mother from the Mare tribe started a project. The project was to build a hut in the forest. She had two sons. The older son was a hunter and gatherer in the forest. He loved and spent all his time in the forest. He had never attended a state or private school but had been educated in nature and traditional knowledge. The younger son was an accountant. He was sent to school, from elementary school to university, in Jayapura.

Of course, the Mare mother chose her older son to build the hut in the forest. The hut was for her and her family to gather food and medicine, find peace and joy, and as a landmark. So, here we see that the Mare mother was capable of attracting, recruiting, and compensating someone with the skills, capacity, and professionalism to carry out the project.

Cerita Anak Adat yang Akuntan

Demikian pula, hal kemampuan dan kapasitas ini adalah seperti cerita lanjutannya: Mama Mare dengan dua anak itu adalah anggota suku Mare yang sedang mengorganisir diri dan mengembangkan BUMMA mereka. Pada saat yang sama, sebuah LSM datang untuk memulai suatu proyek dengan dukungan dana internasional tentang hak masyarakat adat dan perubahan iklim. Wajarlah kemudian LSM tersebut merekrut manusia dan pemuda paling cerdas dan trampil dari suku tersebut, bahkan dari suku-suku lainnya, untuk bekerja di proyek tersebut. Salah satu yang direkrut adalah anak Mama Mare yang lebih muda itu, si akuntan.

Begitulah terus kejadiannya sehingga pada akhirnya semua manusia cerdas dan trampil, semua orang muda

The Story of an Indigenous Child Who is an Accountant

Similarly, the issue of ability and capacity is reflected in the continuation of the story: Mama Mare with her two sons is a member of the Mare tribe, organizing and developing their community-owned business (BUMMA). At the same time, an NGO arrives to start a project with international funding on indigenous peoples' rights and climate change. It is only natural that the NGO would recruit the most intelligent and skilled individuals from the tribe, even from other tribes, to work on the project. One of those recruited was Mama Mare's younger son, the accountant.

Thus, the situation continued until eventually, all the smart and skilled individuals, both young and old, with knowledge and skills from schooling both within the country and



Photo by SAMDHANA/Sandika

dan tua dengan pengetahuan dan ketampilan dari sekolah di dalam dan luar negeri, datang dan bekerja untuk LSM/Pemerintah/Perusahaan. Dengan proyek yang rapih dan dana mereka, LSM/Pemerintah/Perusahaan memiliki kemampuan untuk menarik, merekrut, dan membayar gaji-gaji secara profesional. Sampaaaa... pada akhirnya tidak ada seorang pun yang cerdas dan trampil, sekolah di dalam dan luar negeri, yang tersisa untuk bekerja di organisasi dan lembaga masyarakat adat sendiri, dewan adat, organisasi perempuan adat, BUMMA, sanggar-sanggar, dan sebagainya.

abroad, came and worked for NGOs, government, and corporations. With well-organized projects and funding, NGOs, governments, and corporations had the capacity to attract, recruit, and professionally pay salaries. Eventually, no one remained, the intelligent and skilled individuals, schooled both locally and internationally, were left to work for Indigenous organizations and institutions, such as the Indigenous councils, women's Indigenous organizations, BUMMA, art and cultural centers, and so on.



Photo by SAMDHANA/Naely Himami



Photo by SAMDIANA/Sandika Ariansyah

Memampukan dan Membekali

Kini tibalah saatnya kita menyatakan, "Mari kita memampukan organisasi dan lembaga masyarakat adat, organisasi komunitas, BUMMA, sanggar dan segala rupa, agar mereka dapat menarik, merekrut, dan membayar gaji, memberi insentif dan kompensasi, bagi manusia dan

Empowering and Preparing

Now is the time for us to declare, "Let us empower indigenous organizations and institutions, community organizations, BUMMA, art centers, and all other forms, so they can attract, recruit, and pay salaries, offer incentives and compensation to their smart and skilled people,

orang muda cerdas dan terampil mereka; membekali mereka dengan pengetahuan dan ketrampilan, sistem dan perencanaan, program yang kalau perlu bahkan lebih rapi dan lebih tara.”

Sedangkan kepada dan dengan berbagai komunitas, seperti Komunitas Pemuda, Komunitas Tuli, Komunitas Vespa, Komunitas Basket, Komunitas Peduli, dan lain-lain, bersama-sama kita memampukan dan membekali diri agar menjadi bagian berharga dari segala upaya tersebut, merayakan keindahan dan keanekaragaman Papua, menyelamatkan bumi dan manusia.

Dengan berbagai organisasi non-masyarakat adat, non-komunitas, seperti LSM, aliansi/koalisi LSM, forum multipihak, lembaga-lembaga Pemerintah, Perusahaan, sekolah dan perguruan tinggi negeri dan swasta, pemerintah lokal dan lain-lain, kita akan sama-sama berkata, “Ayo menempuh perjalanan di Jalan Budaya ini bersama-sama!”

equipping them with knowledge and skills, systems and planning, and programs that are even more organized and refined if necessary.”

Meanwhile, with various communities, such as the Youth Community, the Deaf Community, the Vespa Community, the Basketball Community, the Caring Community, and others, we will empower and equip ourselves to become valuable parts of these efforts, celebrating the beauty and diversity of Papua, while safeguarding the earth and its people.

With various non-indigenous, non-community organizations, such as NGOs, NGO alliances/coalitions, multi-stakeholder forums, government agencies, corporations, and both public and private universities, the local governments we will all say together, “Let us embark on this journey along the Path of Culture together!”



Photo by SAMDHANA/Sandika Ariansyah

Chapter V: Orientasi dan Pendekatan

Orientation and Approach

Teritorial

Kita memilih orientasi dan pendekatan kewilayahannya daripada orientasi dan pendekatan komoditas, isu, atau sektoral. Selama ini begitu banyak LSM, program pemerintah, proyek-proyek selalu berkisar pada komoditas ini atau itu, isu ini atau itu, sektor ini atau itu.

Territorial

We choose a territorial orientation and approach rather than a commodity, issue, or sectoral orientation and approach. Until now, many NGOs, government programs, and projects have always centered around this or that commodity, this or that issue, or this or that sector.

Photo by SAMDHANA/Sandika Ariansyah

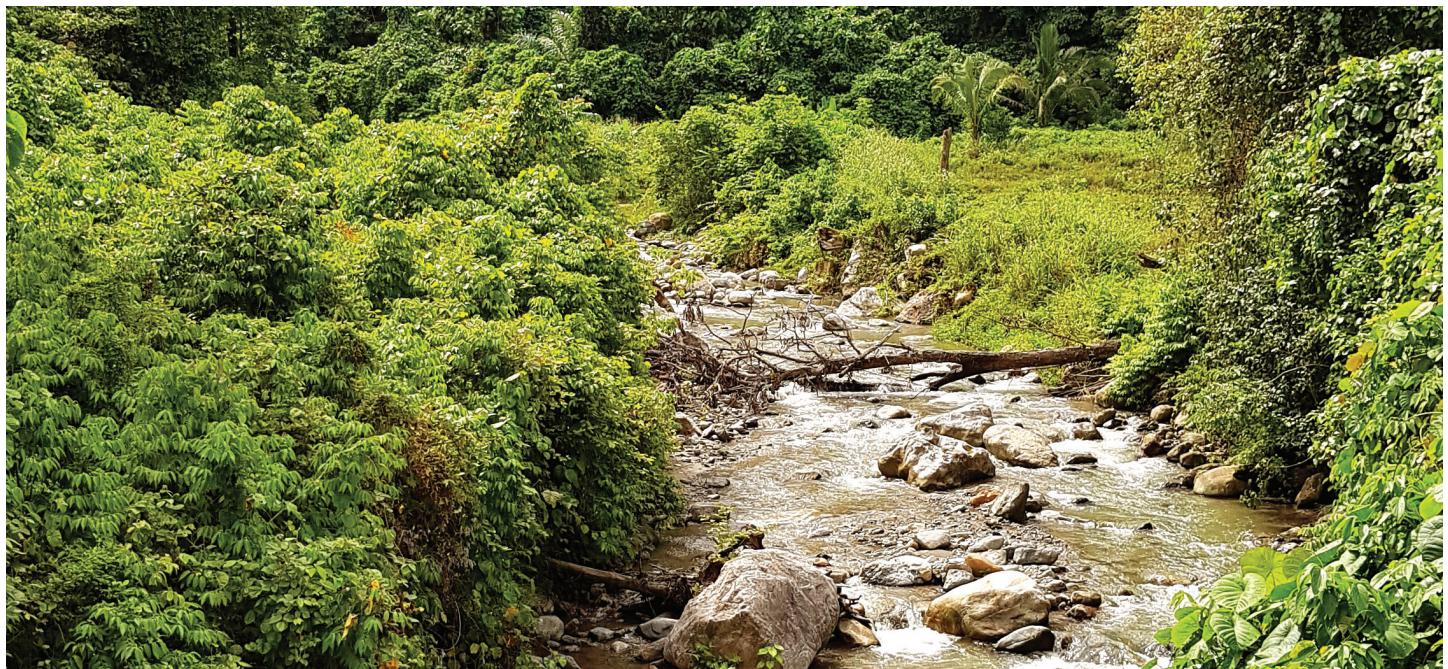




Photo by INFS for SAMDHANA Anggit Saranita

Tetapi, kita mengatakan, "Halnya Masyarakat Adat adalah hal keterhubungan manusia dengan sistem dan praktik kehidupan, institusi, dan teritori."

Kemudian, kita berkata, "Mari memulai dari hal yang paling dasar: melindungi dan mengelola wilayah adat. Kalau wilayah adatnya sudah beres, mereka pasti dapat dan akan mengelola komoditas ini atau itu, isu ini atau itu, proyek-proyek ini atau itu."

But we say, "The matter of Indigenous Peoples is the matter of the connection between humans and their systems and practices of life, institutions, and territory."

Then, we say, "Let us start with the most fundamental: protecting and managing territory. Once the territory is well-managed, they will certainly be able to and will manage this or that commodity, this or that issue, these or those projects."



Institusional

Hal memprioritaskan pembangunan institusi sebelum dan di atas segalanya adalah seperti cerita dari suku Moni di wilayah pegunungan Papua Tengah.

Suatu hari seorang Mama meminta kedua anaknya untuk pergi dan mengumpulkan garam yang diproduksi di kolam asin suku itu. Ada cukup banyak sisa dari proses produksi yang tersebar berserakan di sekitar kolam asin itu. Anak yang laki-laki langsung fokus pada garam itu sendiri. Bersemangat sekali dia segera pergi dan mengambil sebanyak mungkin butiran garam ke dalam genggaman tangannya. Kemudian dia kembali kepada Mama dan menyerahkan garam, yaitu yang berhasil tersimpan dalam genggaman. Banyak yang sudah meleleh di antara jemarinya. Lebih banyak lagi yang telah

Institutional

The priority of building institutions before and above all else is illustrated by a story from the Moni tribe in the central highlands of Papua.

One day, a Mama asked her two children to go and collect salt produced in the tribe's salt ponds. There were plenty of remnants from the production process scattered around the ponds. The son immediately focused on the salt itself. Eagerly, he rushed to gather as many grains of salt as he could hold in his hands. He then returned to Mama and handed over the salt—only what he could hold in his grasp. Much of it had already melted between his fingers, and even more had fallen and been lost during his journey home. In the end, he could only present one and a half spoonfuls of salt to Mama.

lolos, berjatuhan dan hilang selama perjalanan pulang. Akhirnya, hanya ada satu setengah sendok garam yang bisa dia berikan kepada Mama.

Anak yang perempuan melakukannya dengan cara berbeda. Pertama, dia membuat keranjang dari daun pandan. Dia memastikan bahwa keranjang itu kuat dan tidak berlubang. Barulah setelah keranjang itu jadi, dia pergi mengumpulkan garam. Dia menaruhnya di dalam keranjang. Karena dia melihat di sekitar tempat itu ada banyak buah dan sayuran, maka diambilnya pula di ditaruhnya di dalam keranjang. Kemudian, dia kembali ke rumah. Akhirnya, dia bisa menyerahkan garam satu keranjang penuh untuk Mama, plus sayuran gedi, gohi, beberapa jenis beri, untuk makan malam.

The daughter took a different approach. First, she made a basket from pandan leaves, ensuring it was strong and without holes. Once the basket was ready, she went to collect the salt, placing it carefully in the basket. Noticing many fruits and vegetables around the area, she also gathered some and placed them in the basket. She then returned home and was able to present a full basket of salt to Mama, along with vegetables like gedi, gohi, and several types of berries for dinner.



Photo by SAMDHANA/Anggit Saranta

Institusi adalah Noken

Demikianlah maka kita berkata, "Mari kita dampingi dan dukung Masyarakat Adat dalam membangun kelembagaan mereka, baik itu institusi politik, ekonomi, atau budaya. Karena, ketika mereka memiliki institusi yang rapat dan kuat, mereka akan dapat melakukan apapun, mencapai apapun, memproduksi apapun."

Hakikatnya institusi adalah noken. Dan, sungguh benarlah bahwa sebuah noken yang baik adalah serupa keranjang yang ketat dan kuat, dapat diisi dengan apa pun, dapat menampung dan melindungi apa pun, untuk jangka lama, mungkin selamanya."

Institution is Noken

Thus, we say, "Let us accompany and support Indigenous Peoples in building their institutions, whether political, economic, or cultural. Because, when they have solid and strong institutions, they will be able to do anything, achieve anything, and produce anything.

In essence, an institution is a noken. And it is truly true that a good noken is like a tight and strong basket, capable of holding anything, containing and protecting anything, for a long time, perhaps forever."

Photo by SAMDHANA/Anggit Sarantia





Photo by SAMDHANA/Abyan

Merajut Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Sekali lagi kita kembali kepada kesadaran bahwa hanya masyarakat yang terajut dan terorganisir seperti noken yang dapat membangun institusi dan mengelola teritori. Demikianlah supaya tercipta perubahan menuju kebaikan. Demikianlah supaya terjadi di Tanah Papua: marga-marga yang terorganisir menjadi suku, suku-suku yang terorganisir di dalam Wilayah Budaya, dan seluruh dan semua menjadi Masyarakat Adat Papua yang terorganisir.

Maka kita akan bisa berkata, "Lihatlah orang-orang Papua yang terorganisir itu! Tidak ada sesuatupun, tidak ada industri ekstraktif, tidak ada penunggang politik, tidak ada aliran fanatik, tidak ada apapun yang akan dapat menghancurkan sosial, ekonomi, budaya, wilayah, dan alam dari orang-orang yang terorganisir seketar dan sekuat itu."

Weaving Indigenous Peoples and Local Communities

Once again, we return to the understanding that only communities that are interconnected and organized like a noken can build institutions and manage their territories. This is how positive change can take place. This is how it should happen in Papua: clans that are organized into tribes, tribes that are organized within Cultural Regions, and all of them forming an organized Indigenous People of Papua.

Then we will be able to say, "Look at the Papuan people who are organized! There is nothing, no extractive industries, no political exploiters, no fanatic movements, nothing that can destroy the social, economic, cultural, territorial, and natural integrity of people who are organized as tightly and strongly as that."

Chapter VI: **Maju...Majulah Suku-Suku**

Move Forward, Tribes!

Demikianlah, kita akan bekerja dengan dan di tingkat suku, bukan individu, bukan keluarga, bukan tingkat marga, bukan tingkat kampung atau distrik. Kita akan mendampingi, mendukung, memampukan, dan membekali suku-suku untuk mengorganisir diri, memetakan teritori, advokasi menuju rekognisi. Agar semua suku berdaya melakukan agenda ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri.

Demikianlah adanya supaya taatlah kita kepada ketetapan sejak awal untuk memilih Jalan Budaya. Karena Jalan Budaya maka kita bekerja bersama suku-suku, karena suku-suku lah pemilik budaya dan nilai-nilai, yang keduanya dirumahi oleh bahasa-bahasanya.

Jalan Budaya adalah sebuah jalan yang pasir, batu, dan aspalnya adalah jalan hidup, sistem, dan wilayah adat suku-suku itu; yang marka jalannya adalah bahasa. Agar maju dan berdaulatlah suku-suku atas hidup, kekayaan, dan wilayahnya.

Thus, we will work at the tribal level, not with individuals, not with families, not with clans, nor with villages or districts. We will accompany, support, empower, and equip the tribes to organize themselves, map their territories, and advocate for recognition. So that all tribes are empowered to carry out their own economic, social, and cultural agendas.

This is how it should be, so let us remain faithful to the decision from the beginning to choose the Cultural Path. Because of the Cultural Path, we work together with the tribes, as it is the tribes that own the culture and values, both of which are housed within their languages.

The Cultural Path is a road whose sand, stones, and asphalt are the way of life, systems, and ancestral territories of the tribes; the road signs are their languages. So that the tribes can move forward and maintain sovereignty over their lives, wealth, and territories.

Hopefully, in this way, we will no longer, perhaps unintentionally, contribute to the fragmentation of Papua,

Moga-moga dengan demikian, kita tidak lagi, barangkali di luar sengaja, berkontribusi pada meruyaknya fragmentasi Papua, akibat puluhan tahun dipaksa tanpa merasa untuk terus memperkecil dan memperkecilkan lagi ruang perhatian, rasa memiliki, solidaritas, ikatan, keterhubungan, ruang hidupnya; sampai menjadi individualis saja, keluarga, kelompok, marga saja kah, atau orang kampung a.

which has been exacerbated by decades of being forced, without realizing it, to continuously narrow and shrink the space for attention, a sense of belonging, solidarity, bonds, connections, and living space; until it leads to individualism, or merely to family, clan, or village identities.

Indeed, the fragmentation and disorganization have been ongoing for far too long. It is not only concerning the Indigenous Papuans, the Indigenous Peoples, but also

Benar bahwa ruyaknya fragmentasi dan dis-organisasi ini sudah berlangsung terlalu lama.

“Indeed, the fragmentation and disorganization have been ongoing for far too long.”

Benar bahwa ruyaknya fragmentasi dan dis-organisasi ini sudah berlangsung terlalu lama. Bukan hanya berkenaan dengan Orang Asli Papua, Masyarakat Adat, akan tetapi terkait pula dengan transmigrasi, in-migrasi, dan pendatang yang sudah menjadi mayoritas di banyak kota di Papua, komunitas-komunitas adat yang bergeser ke gunung, atau ke pantai, ke pinggiran atau ke sudut-sudut jalanan kota. Dalam situasi seperti ini, geser-gejolak-gerak-gesek-riak, sangat mudah memang untuk memilih jalan Politik Identitas. Tapi kita akan mengatakan, “marilah tetap pada Jalan Budaya. Pada keutamaan

relating to the transmigration, in-migration, and settlers who have become the majority in many cities in Papua, to the indigenous communities that have moved to the mountains, to the coast, to the outskirts or corners of city streets. In such a situation, the shifts, movements, and tensions make it easy to choose the path of Identity Politics. But we will say, “Let us remain on the Cultural Path. On the virtues of dignity and indigenous leadership.”

Because one of us once said, “We are all clans within this tribe, and in fact, even with neighboring tribes, we share many familial ties. We can resolve issues, distribute access

marwah dan kepemimpinan adat.”

Sebab, salah satu dari kita pernah berkata, “Kami semua marga di suku ini sebenarnya adalah keluarga, bahkan dengan suku tetangga pun kami ada banyak hubungan keluarga. Kami bisa menyelesaikan masalah, mendistribusikan akses ke tanah, mengakui batas, mengelola ruang hidup bersama, dan sebagainya, sebagai sebuah keluarga. Yang tong perlu adalah pemastian wilayah suku dan pengakuan pemerintah saja. Selebihnya biarlah kami urus secara internal sebagai keluarga.”

Demikianlah supaya ketika semua ini terjadi, Masyarakat Adat Papua akhirnya akan memiliki peluang –pada skala ekonomi-sosial-budaya—dalam berhadapan dengan perusahaan dan pemerintah yang datang dengan berbagai macam konsesi, modal, dan perlengkapannya.

to land, recognize boundaries, manage shared living spaces, and so on, as a family. What we need is the assurance of the tribe's territory and government recognition. Beyond that, let us manage everything internally, as a family.”

Thus, when all of this happens, the Indigenous Peoples of Papua will finally have the opportunity – on an economic, social, and cultural scale – when facing companies and governments that come with various concessions, capital, and resources.



Photo by SAMDHANA/Anggit Saranta

Chapter VII: **Epilog:** **Panggilan Strategis**

Strategic Call



Pada titik ini jelaslah bahwa kita membuat pilihan-pilihan dari begitu banyak cara untuk menjadi dan membawa perubahan di Tanah Papua. Sekumpulan pilihan inilah dimana kita berada, dilandasi segala apa yang kita ketahui dan rasakan, kita analisis, juga pada mimpi-mimpi kita.

Biarlah pula semua orang melihat bahwa kita siap untuk tidak mengungkung diri pada batas-batas paksa peraturan-perundangan dan pendanaan yang tersedia saat ini, tetapi justru mencipta kemungkinan-kemungkinan baru.

Demikianlah, kita memasuki musim tanam tahun 2025 hingga 2030. Kita telah memilih untuk bekerja pada Jalan Budaya. Kita menjalani jalan hidup masyarakat adat, menoken, kebangkitan bahasa, ritual dan upacara, dan seni; sekuat dan sedalam, bahkan lebih kuat dan lebih dalam, dari segala jalan lain-lain seperti biasanya.

Kita telah memilih tema-tema Hak-Hak Masyarakat Adat, Ekonomi, Keanekaragaman Hayati, dan Perubahan Iklim.

Kita telah memilih bahwa dalam mendefinisikan pengembangan kapasitas, kita bermaksud memampukan organisasi dan lembaga masyarakat adat, berbagai komunitas lokal, agar memiliki sumber daya, sistem, dan rencana; dan membekali manusia-manusianya. Agar tinggal dan pulang kampunglah, bekerjalah manusia-manusia terampil, berkapasitas, dan generasi muda yang telah bersekolah bahkan sampai penjuru dunia, untuk organisasi dan institusi, komunitas sendiri.



At this point, it is clear that we are making choices from a multitude of ways to bring change to Papua. This collection of choices is where we stand, grounded in everything we know and feel, in our analysis, and also in our dreams.

Let us also allow everyone to see that we are ready not to confine ourselves to the limiting boundaries of current laws and available funding, but rather to create new possibilities.

Thus, we enter the planting season from 2025 to 2030. We have chosen to work on the Cultural Path. We are living the life path of indigenous peoples, the noken, the revival of language, rituals, ceremonies, and arts; as strong and as deep, even stronger and deeper, than any other usual paths.

We have chosen the themes of Indigenous Rights, Economy, Biodiversity, and Climate Change.

We have chosen that in defining capacity building, we intend

Demikian pula, kita berorientasi dan menggunakan pendekatan kewilayahan daripada komoditas/isu/sektoral.

Demikian pula, kita berorientasi dan berpendekatan institusional. Karena sungguh benarlah cerita-cerita dan nubuat, seperti kisah Mama Mare dan Mama Moni dan Mama Namblong, bahwa institusi adalah noken.

Bawa pada akhirnya semua hal ini adalah tentang pengorganisasian menuju gerakan sosial-ekonomi lingkungan Papua. Di sanalah, dalam dan bersama suku-suku Papua ada masa depan dan keselamatan manusia, hutan, alam semesta.

Dan, semoga 300 lebih suku-suku yang ada di Papua menjadi terorganisir, mampu, dan maju; berdaulat dan bermartabat atas kehidupan dan wilayah, kekayaan alam budayanya.

Akhirnya, kita berkata, "Strategi ini menceritakan kisah-kisah kita; bagi setiap orang, setiap organisasi, komunitas untuk terlibat, mendukung, dan mewujudkannya. Harap semua memadu dan bekerja laju!"

Sungguh kami berharap Jalan Budaya ini bukan hanya milik Samdhana, tapi kita semua.

Semangat kaka...

to empower the organizations and institutions of indigenous peoples and various local communities to have the resources, systems, and plans; and to equip their people. So that skilled, capable individuals, and the younger generation who have studied even abroad, will return home and work for their own organizations, institutions, and communities.

Likewise, we are oriented and adopting a territorial approach rather than a commodity/issue/sectoral approach.

Similarly, we are oriented and using an institutional approach. Because truly, the stories and prophecies, such as the tales of Mama Mare, Mama Moni, and Mama Namblong, prove that institutions are the noken.

In the end, all of this is about organizing towards a socio-economic-environmental movement for Papua. There, within and with the Papuan tribes, lies the future and safety of people, forests, and the universe.

And may the more than 300 tribes in Papua become organized, capable, and advanced; sovereign and dignified over their lives, territories, and natural and cultural wealth.

Finally, we say, "This strategy tells our stories; for every person, every organization, and community to engage, support, and realize it. May everyone come together and work fast!"

We truly hope that this Cultural Path is not only Samdhana's but belongs to all of us.

Cheers, everyone...

Samdhana Institute sincerely acknowledges the valuable contribution of the following persons, partners and organizations who have contributed to this Papua Strategy:

1. Yayasan Silva Papua Lestari
2. Yayasan Wasur Lestari Papua/YWLP
3. Perkumpulan Harmoni
4. PtPPMA (for working area in Mappi)
5. Yayasan Petrus Vertenten
6. YASANTO
7. ELADPPER
8. Wakil 3 Rektor Universitas Musamus (Ibu Yosehi Mekiuw)
9. Papua Paradise Center
10. Ketua Dewan Adat Sarmi (Maxi)
11. Sekretaris MSF (Hendrik Sorondanya)
12. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sarmi (Agus Jumalena)
13. Kepala Bappeda Sarmi (Frans Rumakik)
14. Kelompok Kelapa Pilemon (Pilemon Kantum)
15. LMA Manirem (Jemjeman)
16. KIPAS (David Saweri)
17. Wahana Sarmi Sejahtera (Ahmadi)
18. Kepala Suku Rumbuai
19. Assisten I Setda Kabupaten Sarmi
20. Tokoh pemuda Meepago (Kurius Duwiri)
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Bersama dengan Kepala Bidang (Yan Pugu, Markus Decky Ngamel, Ferry Rumbino)
22. Kepala KPH Nabire (Mario Duwiri)
23. Komunitas Rizhipora Shalom Nabire (Juan Erari)
24. Kelompok konservasi penyu Rasama (Anies Erari)
25. Kepala Suku Makimi
26. Kepala keuangan Paniai (Alex Manangsang)
27. Kepala Bandara Udara Paniai (Alex Lamba)
28. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Paniai (Agus Jumalena)
29. Pastor Paroki Moanemani (Yohan OFM)
30. Kepala Bappeda Nabire (Edison Howay)
31. Ketua Yayasan Primari (Krisna Tohariadi)
32. Yayasan Kristus Sahabat Kita (Thomas)
33. Yayasan Kompak (Usman Fabanyo)
34. Yayasan Tapesia (Doni Arebo)
35. Yayasan Memorial

36. Assisten 2 bidang Pemerintahan Provinsi Papua Tengah (Anisius You)
37. Anggota DPRD Nabire dari partai PDIP (Nancy Worabai)
38. Pertemuan dengan Dewan Adat Meepago (Herman Sayori)
39. Mare Tribe, BUMMA Mare
40. KOMPIPA, Sorong
41. Kaleka, Fakfak
42. KPHP Fakfak
43. LMA Mbaham-Matta Fakfak
44. STIE and STIA, Fakfak
45. Bappeda Fakfak
46. Raja Pertuanan Arguni, Fakfak
47. Dewan Adat Mbaham-Matta, Fakfak
48. Yamiko
49. Asosiasi Petani Madu
50. YBAW (Yayasan Bina Adat Walesi)
51. Kelompok Wisata Hutan Kota di Pugima
52. Kelompok Wisata di Kumugima
53. LSPK (Lembaga Studi Pengembangan Komunitas)
54. Koperasi Kopi Aluama Hubulama
55. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
56. BAPPEDA Jayawijaya
57. Balai Taman Nasional Lorentz
58. Komunitas Fotografer Wamena
59. RUNSRAM (Herman Werwer, Samuel Ansek, Obet Yakobus Asek, Oni, Simon Morin)
60. Kepala KPHL Biak Supiori (Meilin)
61. Kelompok Samares (Edison Howay)
62. Ketua Yayasan ILLMA
63. Kain Kain Karkara Byak
64. Komunitas Budaya Farundu
65. Komunitas Pemuda Adat Byak
66. Kabid Fispra Provinsi (Ibu Vera)



<https://samdhana.org>  samdhana.institute  samdhana  samdhana_inst  samdhana institute